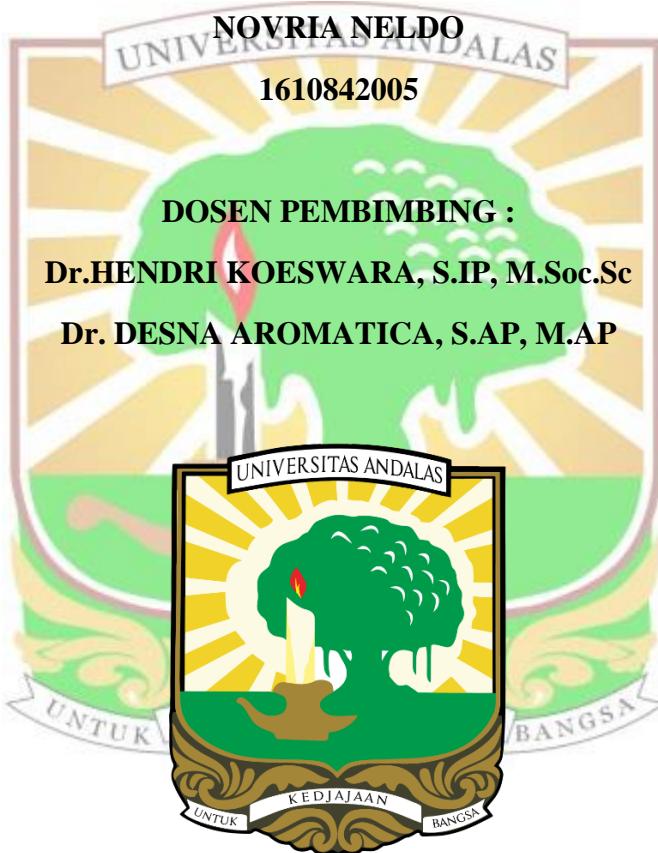


**STRATEGI NAGARI KAMANG HILIA SEBAGAI DESA ANTI KORUPSI  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi  
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**OLEH:**



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## ABSTRAK

**Novria Neldo, 1610842005, Strategi Nagari Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi, Departemen Administasi Publik, Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2023, Dibimbing Oleh : Dr. Hendri Koeswara, SIP,M.Soc.Sc dan Dr. Desna Aromatic, S. AP, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 113 halaman dengan referensi 4 buku, 4 skripsi, 2 jurnal, dan 1 website internet.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah korupsi yang menjadi isu yang paling krusial di Indonesia. Pemetaan kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan kasus korupsi paling tinggi terjadi di pemerintahan tingkat Kabupaten dan Desa. Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memiliki program kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan salah satunya adalah program pembentukan Desa Anti Korupsi. Program ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2021. Pada tanggal 7 Juni 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 desa di Indonesia sebagai pionir Program Desa Percontohan Anti Korupsi salah satunya adalah Nagari Kamang Hilia dengan alasan dipilih karena bagus dalam hal administrasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi yang akan dilakukan pemerintah Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi.

Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Koten yang mencakup 4 variabel yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya dan strategi kelembagaan. Penelitian ini berlokasi di Nagari Kamang Hilia dengan unit analisis pemerintah Nagari Kamang Hilia. Metode yang diterapkan yaitu metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data dilaksanakan dengan metode triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian ini strategi yang digunakan oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi belum sepenuhnya berjalan. Dimana dalam strategi organisasi sudah sejalan dengan visi dan misi pemerintah Nagari Kamang Hilia. Pada strategi program belum banyak yang bisa dilakukan pemerintah Nagari Kamang Hilia karena statusnya yang masih baru sebagai desa anti korupsi dan belum memiliki anggaran dalam membuat program. Pada strategi sumber daya pemerintah Nagari Kamang Hilia memiliki sumber daya aparatur sebagian besar adalah pendidikan sarjana dan memiliki sarana dan prasarana teknologi informasi seperti *podcast*, *Instagram* dan situs *website*. Pada strategi kelembagaan kewenangan tertinggi berada pada walinagari sebagai pemberi instruksi perintah dan penanggung jawab dan pemeritah seta memiliki standar operasional prosedur demi menjaga kualitas pelayanan yang terbebas dari praktik korupsi.

**Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Desa Anti Korupsi**

## ABSTRACT

**Novria Neldo, 1610842005, Strategy for Nagari Kamang Hilia as an Anti-Corruption Village, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang Dr. Hendri Koeswara, SIP, M.Soc.Sc; Desna Aromatics, S.AP, M.AP.**

This research is motivated by the problem of corruption which is the most crucial issue in Indonesia. The mapping of corruption cases in Indonesia in 2022 shows that the highest corruption cases occur at the district and village levels of government. In order to increase community participation as an effort to eradicate corruption in Indonesia, the Directorate of Community Participation Development of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia has work programs that involve various elements of society and one of them is the Anti-Corruption Village establishment program. This program was first launched on December 1 2021. On June 7 2022 the Corruption Eradication Commission appointed 10 villages in Indonesia as pioneers of the Anti-Corruption Pilot Village Program, one of which was Nagari Kamang Hilia with the reason it was chosen because it was good in terms of administration. So this study aims to see how the strategy will be carried out by the Nagari Kamang Hilia government as an anti-corruption village.

This study uses the strategy theory put forward by Kotter which includes 4 variables, namely organizational strategy, program strategy, resource support strategy and institutional strategy. This research is located in Nagari Kamang Hilia with the Nagari Kamang Hilia government analysis unit. The method applied is a qualitative method with a descriptive type. Data collection techniques using interviews and documentation and observation. Selection of informants using purposive sampling technique. The data validation technique was carried out using the source triangulation method.

From the results of this study the strategy used by the Nagari Kamang Hilia government as an anti-corruption village is good. Where is the organizational strategy in accordance with the vision and mission of the Nagari Kamang Hilia government. In the program strategy, there is not much that the Nagari Kamang Hilia government can do because of its new status as an anti-corruption village and it does not yet have a budget to make programs. In the government resource strategy, Nagari Kamang Hilia has apparatus resources, most of which are undergraduate education and have information technology facilities and infrastructure such as *podcast*, *Instagram* and *sitewebsit*e as a strategy as an anti-corruption village. In the institutional strategy, the highest authority lies with the mayor as the giver of instructions and the person in charge, and the Nagari Kamang Hilia government has standard operating procedures to maintain the quality of service that is free from corrupt practices.

**Keywords:** *Strategy, Nagari Kamang Hilia Government, Anti-Corruption Village*